



BERKALA PERIKANAN TERUBUK

Volume. 39 No. 1

Februari 2011

Analisis Histologi Ginjal Ikan Baung (<i>Hemibagrus Nemurus</i>) Yang Terindikasi Pencemaran Di Perairan Sungai Kampar Provinsi Riau Erlangga	1-14
Dampak Pemberian Kredit Oleh Koperasi Pengembangan Ekonomi Masyarakat Pesisir (Koppemp) Terhadap Pendapatan Nelayan Tangkap Kecamatan Tanjung Mutiara Kabupaten Agam Provinsi Sumatera Barat Eni Yulinda, Zulkarnaini dan Nofri Antoni	15 - 23
Ikan-Ikan Air Tawar Dari Sungai Ukai, Anak Sungai Siak, Riau) Chaidir P. Pulungan	24 - 32
Manajemen Bengkel Mesin Kapal Perikanan Di Kota Dumai Yoki Jiliansyah dan Muchtar Ahmad	33 - 43
Pemetaan Kedalaman dan Pola Arus Pasang Surut Muara Sungai Masjid Dumai Musrifin	44-50
Respon Fisiologis Ikan Jambal Siam (<i>Pangasius Hypophthalmus</i>) Pada Suhu Pemeliharaan Yang Berbeda Henni Syawal dan Yusni Ikhwan S	51-57
Kemampuan Tumbuhan Air Sebagai Agen Fitoremediator Logam Berat Kromium (Cr) Yang Terdapat Pada Limbah Cair Industri Batik Upit Ratna Puspita, Asrul Sahri Siregar dan Nuning Vita Hidayati	58 - 64
Model Komunikasi Pembangunan Perikanan dalam Pemberdayaan Komunitas Nelayan Suku Duano di Propinsi Riau Zulkarnain	65 - 78
Perkembangan Kelimpahan Fitoplankton Dengan Pemberian Pupuk Organik Cair Niken Ayu Pamukas	79-90
Skrining Fitokimia dan Uji Toksisitas Ekstrak Daun Katuk (<i>Saoropus androgenus (L.) Merr.</i>) Terhadap Larva Udang <i>Artemia salina</i> : Potensi Fitofarmaka pada Ikan Dvahruri Saniavasari. Wiranda .G. Piliang	91 -100

Jurnal Penelitian	Volume. 39	No. 1	Halaman 1-100	Pekanbaru, Februari 2011	ISSN 126-4265
----------------------	------------	-------	------------------	-----------------------------	------------------

Diterbitkan Oleh:
HIMPUNAN ALUMNI
FAKULTAS PERIKANAN DAN ILMU KELAUTAN
UNIVERSITAS RIAU

**MODEL KOMUNIKASI PEMBANGUNAN PERIKANAN
DALAM PEMBERDAYAAN KOMUNITAS NELAYAN SUKU DUANO
DI PROPINSI RIAU**
(Analisis Program *Marine and Coastal Resources
Managemen Project* di Propinsi Riau)

OLEH

Zulkarnain¹⁾

Diterima tanggal: 12 Januari 2011 /Disetujui tanggal: 21 Februari 2011

ABSTRACT

This artikel aimed to explain and analysis about model of communication fisheries development in Duano Community in Riau Province, the advantage of this paper is to give information about how to compile the policy of fisheries development in Riau Province. The analysis model of communication fisheries development is needed to implementation for the prosperity of fisherman. The Develop of rural community specially fishermen society needed by the integrity principal and partisipative approach. this Partisipative approach through effort move group organization structures most elementary at the same time with its participation to develop of them and theirs environment. Integrity principle have a meaning of vertical and horizontal.

Key words: model, communication, development, community, fisheris

Pendahuluan

Provinsi Riau merupakan salah satu wilayah yang memiliki berbagai kekayaan sumberdaya perikanan yang cukup banyak dibanding beberapa wilayah yang ada di Sumatera. Kawasan yang memiliki sumberdaya perikanan tersebut merupakan wilayah yang berpulau dan didiami oleh berbagai komunitas, salah satunya komunitas masyarakat terpencil Suku Duano atau sering disebut dengan Suku Laut. Dengan sendirinya komunitas Suku Duano ini adalah bagian dari subjek pembangunan sumberdaya perikanan yang ada di wilayah ini.

Permasalahan selama ini diketahui bahwa komunitas Suku Duano ini telah banyak mendapat berbagai program pemerintah baik itu, berupa program daerah maupun nasional akan tetapi program program tersebut belum optimal mencapai sasaran yang diharapkan oleh standar program tersebut. Memang diketahui bahwa komunitas Suku Duano ini kurang memiliki keberuntungan dalam hal kesempatan dan menggunakan peluang untuk memperoleh akses informasi dibandingkan komunitas lainnya, seperti Melayu, Banjar, Bugis, Jawa dan minang yang ada di Propinsi Riau.

Program yang dijalankan didindikasikan masih belum

¹⁾ Mahasiswa Program Doktor IPB, Bogor

sesuai dengan output yang diharapkan oleh pemerintah sebagai pembuat kebijakan, misalkan saja pada Program *Marine and Coastal Resources Management Project* (MCRMP) yang dilaksanakan sejak tahun 2003 hingga tahun 2008 masih menyisakan berbagai permasalahan, diantaranya adalah kelompok usaha masyarakat belum berkembang. Belum berkembangnya usaha ekonomi kelompok nelayan menjadi sebuah lembaga ekonomi kerakyatan, pemanfaatan dana bantuan tidak dapat bergulir diantara para nelayan Suku Duano sehingga program yang dijalankan belum dapat menghasilkan capaian sebagaimana mestinya (Zulkarnain, 2009).

Kondisi ini diindikasikan oleh sebab beberapa hal, di antaranya adalah adanya kecenderungan kurangnya lembaga pemerintah maupun swasta dalam menindak lanjuti berbagai program yang telah dilakukan pada komunitas Suku Duano khususnya program pembangunan perikanan di wilayahnya karena kesulitan dalam mengakses wilayahnya yang tersebar di daerah pesisir di Propinsi Riau.

Hal ini semestinya dipandang sebagai tantangan dalam melaksanakan pembangunan sumberdaya perikanan, karena komunitas Suku Duano memiliki hak dan kesempatan yang sama dalam mengakses informasi dan inovasi teknologi. Mengingat bahwa komunitas Suku Duano merupakan komunitas masyarakat perikanan yang cukup besar yang ada di Propinsi Riau berdomisili di wilayah sepanjang pesisir yang luas, berarti potensi peningkatan produktifitas sumberdaya perikanan di propinsi

Riau juga tergantung kepada partisipasi mereka.

Masih banyaknya kendala dan permasalahan dalam program pemberdayaan Suku Duano dengan sendirinya akan menjadi bagian yang menghambat proses pembangunan perikanan yang ada di Propinsi Riau. Kesadaran akan pentingnya pemerataan kesempatan dalam pencapaian tingkat kesejahteraan hidup yang lebih baik saat ini menjadi hak bagi seluruh lapisan masyarakat, termasuk di dalamnya komunitas Suku Duano. Komunitas Suku Duano memiliki hak untuk menjadi pelaku pembangunan perikanan saat ini, terlebih dalam konteks program Revitalisasi Pertanian, Perikanan dan Kehutanan (RPPK) dan Revitalisasi Penyuluhan.

Keberadaan masyarakat Suku Duano di wilayah pesisir Kabupaten Indragiri Hilir tepatnya pada kawasan Desa Panglima Raja sampai saat ini masih dalam kondisi tertinggal dari masyarakat lainnya walaupun mereka sudah menjadi objek berbagai program pembangunan salah satunya adalah MCRMP, hal ini dapat terlihat pada kehidupan sehari-hari mereka, terutama rendahnya dalam mengakses pendidikan, kegiatan mata pencaharian yang masih tradisional, wilayah yang sulit dijangkau, keterbatasan infrastruktur perumahan, masih rendahnya kualitas kesehatan, rendahnya akses informasi, keterbatasan sarana transportasi, rendahnya pemahaman terhadap pentingnya menjaga lingkungan, yang semua permasalahan ini adalah penyebab tertinggalnya keberadaan masyarakat Suku Duano ini dari masyarakat lainnya (Zulkarnain, 2009).

Sebagai bagian dari suku yang berbeda dari yang lain, komunitas Suku Duano memiliki budaya yang spesifik, termasuk pola komunikasi di dalam masyarakatnya. Hal ini ditegaskan oleh De Vito (1993) yang menyatakan bahwa setiap masyarakat memiliki cara tersendiri dalam berkomunikasi, termasuk dalam pola komunikasi interpersonal di dalam komunitasnya. Komunitas Suku Duano selama ini masih terbatas kemampuannya dalam akses informasi dan inovasi teknologi khususnya bidang perikanan karena masih bersifat tradisional dan subsistence. Hal ini menghambat kemampuan mereka untuk meningkatkan produktifitas usaha nelayan, pendapatan dan kesejahteraan.

Berdasarkan hal-hal yang telah dijelaskan tersebut, maka diperlukan bagaimana model komunikasi agar akses informasi dan inovasi teknologi yang ada lebih terbuka dan mudah, sehingga diharapkan akan tercapainya pemberdayaan dan revitalisasi pembangunan perikanan yang bersifat partisipatif, arif dan saling menguntungkan. Dalam upaya untuk mengidentifikasi model komunikasi yang tepat dalam pembangunan perikanan pada komunitas Suku Duano, maka diperlukan pencermatan dan tinjauan kritis yang berkaitan dengan keadaan sosial ekonomi, pola dan strategi komunikasi dan hal lainnya terhadap komunitas nelayan Suku Duano di Propinsi Riau.

Tujuan Penelitian

Tujuan penulisan artikel ini adalah untuk menganalisis model komunikasi pembangunan perikanan dalam pemberdayaan komunitas

nelayan Suku Duano di Propinsi Riau.

Manfaat Penelitian

Manfaat Penelitian ini diharapkan memberikan kontribusi kepada pihak terkait seperti Pemerintah Daerah, Dinas Perikanan, Masyarakat dan seluruh *Stakeholders* dalam pengelolaan wilayah pesisir di Kabupaten Indragiri Hilir, Sebagai gambaran dan referensi bagi pembangunan wilayah pesisir secara nasional terutama pembangunan wilayah pesisir yang berbasis potensi dan budaya masyarakat lokal.

Metode penulisan

Metode yang digunakan dalam penulisan ini adalah dengan melakukan review literatur hasil penelitian sebelumnya, jurnal, dan berbagai referensi yang ada, baik dari buku teks atau dari sumber internet.

Sekilas Tentang MCRMP

Marine and Coastal Resources Management Project (MCRMP) dimaksudkan untuk mempromosikan pengelolaan berkelanjutan sumberdaya alam guna peningkatan kualitas lingkungan dan peningkatan kondisi sosial ekonomi di 15 provinsi dalam kerangka desentralisasi. Hal ini akan dicapai melalui : (i) peningkatan kapasitas pemerintah daerah dalam perencanaan dan pengelolaan berkelanjutan sumberdaya pesisir dan laut, (ii) peningkatan ketersediaan dan akses terhadap data spasial berkualitas serta informasi dan data keanekaragaman hayati yang bermanfaat bagi perencanaan sumberdaya, (iii) peningkatan kerangka hukum dan dan peraturan perundangan terkait dengan pengelolaan sumberdaya alam,

beserta upaya penegakannya, dan (iv) implementasi uji coba pengelolaan sumberdaya alam skala kecil guna peningkatan kondisi sosial ekonomi masyarakat dan perbaikan lingkungan.

Tujuan proyek adalah pengelolaan berkelanjutan sumberdaya pesisir dan laut serta keanekaragaman hayati, dan perlindungan terhadap lingkungan. Di Kawasan Desa Panglima Raja dimana tempat bermukimnya mayoritas Suku Duano dijalankan program MCRMP dalam bentuk implementasi komponen Skema pengelolaan Sumberdaya Alam Skala Kecil, yang meliputi:

- Terkelola dan teridentifikasinya skema pengelolaan sumberdaya pesisir skala kecil untuk peningkatan kualitas lingkungan dan sosial ekonomi masyarakat pada wilayah prioritas.
- Terkelola dan teridentifikasinya taman-taman laut mencakup konservasi dan nilai ekonomi di wilayah pesisir dan laut.
- Terlaksananya kegiatan *adaptive research* untuk pengelolaan sumberdaya pesisir yang lebih baik.
- Terlaksananya kegiatan pengelolaan sumberdaya alam skala kecil di wilayah pesisir. (www.dkppemprop-riau.go.id).

Implementasi program MCRMP di Kawasan Panglima Raja Propinsi Riau hingga akhir program pada tahun 2008, masih menyisakan banyaknya permasalahan diantaranya:

- Putusnya keberlangsungan dana bergulir dari bantuan

pengelolaan sumberdaya alam skala kecil, dikarenakan kredit macet dan telah berakhirnya program.

- Masih rendahnya kesadaran masyarakat, hal ini terlihat dari perilaku mereka yaitu belum merasa memiliki hasil kegiatan MCRMP yang di implementasikan di wilayahnya.
- Masih terjadinya ilegal fishing dan penebangan mangrove dikarenakan kurangnya pengawasan dari kelompok pengelola sumberdaya yang dibentuk.
- KKUB dan KUB yang telah dibentuk tidak dapat meneruskan rencana kegiatan yang direncanakan setelah program berakhir.
- Rendahnya kemampuan keberlanjutan mata pencaharian alternatif
- Terhentinya pengawasan dan evaluasi dari dinas terkait terhadap hasil dari pelaksanaan program MCRMP dikarenakan adanya program lain, di beberapa daerah lainnya.
- Masih berlangsungnya permasalahan nelayan terutama dalam hal akses teknologi, pemasaran hasil, ketergantungan dengan tauke, rendahnya pendapatan, lemahnya motivasi pendidikan, dan sebagainya.

Profil Masyarakat Suku Duano

Karakteristik Sosial Budaya

Keadaan masyarakat Desa Panglima Raja tidak terlepas dari keberadaan suku Laut atau Suku Duano. Suku Laut terkenal sebagai representasi masyarakat bahari, yakni

masyarakat yang memiliki jiwa bahari dengan tradisi menjadikan laut sebagai basis terbentuknya kebudayaan. Hal ini disebabkan Suku Laut dulunya hidup berkelana menangkap ikan dengan sampan yang mereka istilahkan dengan “berkajang” yang ternyata juga sekaligus berfungsi sebagai rumah, sehingga semua aktivitas kehidupan dilakukan di atas sampan tersebut. Namun demikian, saat ini sulit ditemukan pola hidup Suku Laut yang demikian, sebaliknya mereka sudah hidup menetap di sepanjang wilayah pesisir.

Penduduk suku laut (Suku Duano) merupakan keturunan dari perkawinan campuran dua ras besar yaitu ras Veddoid dan Mongoloid (Proto-Melayu). Percampuran tersebut terlihat dari ciri-ciri fisik orang Suku Laut yang tidak terlalu tinggi, berpostur tubuh atletis, bidang dada lebar, dan ukuran tulang pinggul sampai ke kaki panjang. Raut muka suku laut bersegi dengan tulang rahang yang lebar. Warna kulit suku laut cenderung hitam dan rambut ikal berwarna hitam. Karakteristik temperamental psikologi sifat Suku Laut adalah

cepat tersinggung dan marah, namun mereka termasuk orang yang mudah beradaptasi, mandiri dan mobilitas tinggi yang mencirikan “etos kepepesisiran” (Badan Penelitian Pengembangan dan Pemanfaatan Sumberdaya Perairan, 2004)

Kehidupan masyarakat Suku Duano sangat tergantung dengan wilayah pesisir, laut menjadi bagian utama yang tak terpisahkan dalam sistem kehidupan masyarakat Suku Duano. Mereka memanfaatkan laut sebagai tempat tinggal dan sumber mata pencaharian utama dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari. Boleh dikatakan bahwa masyarakat Suku Duano tidak dapat melakukan kegiatan sehari-harinya tanpa aktifitas melaut. Menangkap ikan dan mencari kerang di kawasan pesisir panglima raja merupakan bagian aktifitas kehidupan yang mengisi kesibukan masyarakat Suku Duano.

Pendidikan Masyarakat Suku Duano

Secara umum tingkat pendidikan masyarakat Suku Duano desa Panglima Raja disajikan dalam Tabel 1.

Tabel 1. Tingkat Pendidikan Masyarakat Desa Panglima Raja, Tahun 2009

No	Tingkat Pendidikan	Dusun Panglima Raja	Dusun Sungai Condong	Jumlah	Persentase (%)
1.	Tamat dan tidak SD	1.431	300	1.731	90,02
2.	Madrasah Ibtida'iah	28	1	29	1,51
3.	SMP	112	4	116	6,03
4.	SMA/SMU	34	4	38	1,98
5.	D1-D3	1	1	2	0,10
6.	S1	4	2	6	0,31
7.	Pondok Pesantren	-	1	1	0,05
Jumlah		1.610	313	1.923	100,00

Sumber: Monografi Desa 2009

Tabel 1 menjelaskan bahwa tingkat pendidikan masyarakat di Desa Panglima Raja yang sebagian besar Suku Duano mayoritas pada Pendidikan Dasar. Hal ini dapat dijelaskan bahwa mayoritas masyarakat berpendidikan rendah, disebabkan oleh sarana pendidikan yang tersedia hanya sampai tingkat sekolah dasar (SD) sedangkan untuk tingkat lanjutan tidak tersedia.

Keadaan Ekonomi Masyarakat Suku Duano

Pendapatan masyarakat Nelayan Suku Duano pada umumnya berpendapatan rendah, hal ini dikarenakan sikap hidup yang tidak bisa mengendalikan keadaan keuangan keluarga, keadaan ekonomi yang masih subsistence, belum pandainya menggunakan potensi sumberdaya yang dimiliki, masih tergantung dengan sistem penangkapan, dan pada umumnya menjadi buruh nelayan dari beberapa tauke etnis tionghoa. (BP3SP, Faperika UR, 2008).

Model Komunikasi Pembangunan dalam pemberdayaan Suku Duano

Konsep dan strategi pembangunan yang selama ini dijalankan, yang cenderung seragam secara nasional, belum mampu menjangkau komunitas Suku Duano secara memadai. Hal ini disebabkan karena strategi komunikasi informasi yang dijalankan dari atas ke bawah tersebut berbentuk seragam padahal kondisi penerima (*audiens*) sangat beragam. Lebih jauh, berbagai asumsi dan prasyarat penerima (*receiver*) dari kebijakan strategi komunikasi tersebut tidak mampu dipenuhi oleh sebagian

masyarakat, termasuk oleh masyarakat Suku Duano.

a. Model Komunikasi Kelompok

Beberapa kajian tentang model komunikasi telah banyak dilakukan oleh beberapa peneliti dari berbagai sudut pandang keilmuan. Model komunikasi kelompok merupakan salah satu bidang yang menjadi perhatian kalangan ahli komunikasi, karena komunikasi pada level ini memiliki pola dan bentuk tersendiri yang berbeda dengan komunikasi pada level individu maupun komunikasi massa. Selain itu, untuk mengembangkan komunikasi kelompok pada satu masyarakat tertentu juga dibutuhkan strategi tersendiri yang berbeda dengan komunikasi kelompok di masyarakat lain. Hal ini terkait dengan ciri dan struktur kelompok dalam komunitas tersebut, serta perannya dalam masyarakat secara keseluruhan. Dalam komunikasi kelompok, peranan individual yang berada di dalamnya berbeda-beda, tergantung kepada posisi dan wewenangnya dalam kelompok tersebut.

b. Peningkatan Peran Inovator

Dalam pembangunan pertanian, Rogers (1983) mengungkapkan bahwa peranan inovator akan sangat berpengaruh dalam terjadinya difusi dan adopsi suatu inovasi teknologi pertanian. Inovator dapat berupa personal tokoh masyarakat ataupun lembaga adat yang riil hidup di tengah masyarakat seperti misalnya Dewan Adat dan tokoh Masyarakat. Pada Suku Duano, meskipun sebutan bagi tetua atau tokoh adatnya berbeda-beda, namun memiliki peran yang

sama yaitu sebagai panutan yang diikuti oleh komunitasnya. Tokoh adat merupakan pemimpin dalam komunitasnya, dan memiliki otoritas dalam berbagai bidang sekaligus. Oleh sebab itu peran tokoh adat dan tokoh masyarakat tersebut dapat dijadikan pintu masuk (akses), penghubung atau *liaison person* antara komunitasnya dan luar komunitasnya dalam penyampaian informasi dan inovasi teknologi. Fungsi *liaison* tersebut menjadi penting karena dapat menyampaikan dan menerima inovasi teknologi pertanian atau perikanan dari atau kepada komunitasnya. Selain itu, peran tokoh adat sebagai panutan dan pemimpin dalam komunitasnya akan dipercaya untuk menyampaikan informasi dari komunitasnya ke luar komunitasnya, dan sebaliknya untuk menyampaikan inovasi dari luar komunitasnya ke dalam komunitasnya sendiri.

Hasil penelitian Kifli (2007) dari hasil penelitiannya tentang pemberdayaan Komunitas Dayak menjelaskan bahwa model komunikasi yang perlu dikembangkan dalam pemberdayaan tokoh adat sebagai *liaison person* tersebut adalah berupa pemberdayaan komunikasi kelompok komunitasnya. Komunikasi kelompok yang dapat dikembangkan yaitu berupa pemberdayaan pertemuan kelompok dalam komunitasnya dengan mengembangkan pola penyampaian pendapat secara partisipatif oleh seluruh anggota pertemuan. Pertemuan adat tersebut dapat berupa pesta adat, upacara adat atau pertemuan adat yang bersifat rutin maupun temporer. Melalui pertemuan adat yang dipandu oleh tokoh adat yang berpengaruh dalam

komunitasnya, maka dapat disampaikan dan di bicarakan berbagai hal di luar permasalahan adat. Dengan demikian diharapkan akan dicapai pemahaman bersama tentang suatu hal atau masalah di dalam anggota komunitas tersebut. Agar keputusan-keputusan yang dihasilkan merupakan kesepakatan bersama seluruh komponen komunitas, maka pertemuan-pertemuan tersebut harus berlangsung dalam suasana yang partisipatif.

Mahmud (2007) dalam kajiannya bertujuan untuk memberdayakan masyarakat dalam hal penyediaan sarana pedesaan menjelaskan bahwa struktur model hipotetik terbukti dapat diterapkan secara signifikan pada model komunikasi penyediaan prasarana perdesaan non keagamaan sebagai *model eksperimen* dan model komunikasi penyediaan sarana prasarana keagamaan sebagai *model kontrol*, sebagian besar kegiatan komunikasi pada semua tahapan yang dilakukan oleh pemerintah dalam komunikasi penyediaan prasarana perdesaan non keagamaan masih menjadi prioritas utama pengembangan model, sebab komponen-komponen kegiatan tersebut pada model kontrol termasuk penting, namun kenyataan penerapannya pada model eksperimen rendah. Hanya dua kegiatan yang kinerjanya sudah relatif baik, yaitu sosialisasi (*diseminasi*) dan penggerakan swadaya gotong-royong

c. Pemerataan Penyebaran Informasi Melalui Komunikasi Massa

Di dalam pembangunan negara-negara berkembang yang sebagian besar masyarakatnya adalah

masyarakat pertanian termasuk di dalamnya adalah sektor perikanan, diperlukan paradigma pembangunan baru yang memperhatikan beberapa hal, diantaranya adalah pemerataan penyebaran informasi dan keuntungan sosial ekonomi (Rogers, 1976). Hal ini sesuai dengan Undang-Undang Nomor 12/ 1992 Tentang Sistem Budidaya Pertanian Bab VI Pasal 57 ayat (2), bahwa Pemerintah berkewajiban memberikan pelayanan informasi yang mendukung pengembangan budidaya tanaman serta mendorong dan membina peran serta masyarakat dalam pemberian pelayanan (Departemen Dalam Negeri, 1992).

Kaitan dengan hal tersebut, maka pemerintah selaku penyelenggara negara memiliki tanggung jawab untuk membuka akses informasi dan inovasi teknologi terhadap warga negaranya, termasuk dalam hal ini adalah komunitas Suku Duano. Di dalam Pidato Presiden pada Penganjangan Revitalisasi Pertanian, Perikanan dan Kehutanan (RPPK) di Jatiluhur pada tanggal 11 Juni 2005, menyebutkan bahwa beberapa kebijakan yang langsung terkait dengan sektor pertanian dan dalam kewenangan atau memerlukan masukan dari Departemen Pertanian, adalah (butir f) kebijakan dalam meningkatkan inovasi dan diseminasi teknologi tepat guna diarahkan untuk percepatan proses dan perluasan jaringan diseminasi dan penjangkauan umpan balik inovasi pertanian (Pidato Presiden RI, 2005).

Soesanto, (1982) menjelaskan pendekatan yang dapat dilakukan dalam membuka akses informasi dalam rangka percepatan diseminasi tersebut adalah dengan

pemberdayaan komunikasi massa melalui media massa, seperti media televisi dan radio. Media radio sebagai perangkat komunikasi massa pada dekade 1970-1980 telah terbukti dapat menjadi salah satu ujung tombak dalam mendukung pembangunan pertanian di Indonesia dengan berfungsinya Kelompencapir (kelompok pendengar, pembaca dan pemirsa) yang berperan kuat dalam menyampaikan informasi pertanian.

Kifli (2007) dalam hasil penelitiannya menjelaskan Kelompencapir dan media radio telah terbukti positif dapat diberdayakan kembali dengan memanfaatkan dalam menyampaikan informasi inovasi teknologi pertanian yang bersifat dua arah (*two way communication*) dan interaktif. juga menjelaskan selain media radio, saat ini media televisi bukan lagi merupakan barang mewah.

d. Model Komunikasi Partisipatif

Noor (2008) dalam hasil penelitiannya tentang strategi komunikasi pembangunan masyarakat pusat perikanan menjelaskan bahwa untuk membangun pedesaan khususnya masyarakat nelayan diperlukan pendekatan model partisipatif dan prinsip keterpaduan. Pendekatan partisipatif ini melalui upaya menggerakkan bentuk-bentuk organisasi kelompok paling dasar bersamaan dengan peransertanya untuk membangun diri dan lingkungannya. Prinsip keterpaduan bermakna vertikal dan horizontal. Keterpaduan vertikal terkait dengan rantai produksi perikanan dari segi pengelolaan sumber, penangkapan, pengolahan, pemasaran, termasuk pembuatan kapal dan bengkel. Keterpaduan horizontal dalam

kaitannya dengan pengalihan sumber di luar perikanan yang menunjang seperti PAM, listrik, pasar, kesehatan, pendidikan dan sebagainya.

Selanjutnya Rangkuti (2009) dalam kajiannya tentang Strategi komunikasi membangun kemandirian pangan menjelaskan untuk memberdayakan petani di pedesaan diperlukan strategi pengembangan model komunikasi organisasi koperasi dengan kelengkapan seperangkat elemen pendukung yang dikemas dalam suatu program terpadu agar seluruh *stakeholder* dapat berperan melalui suatu jaringan komunikasi informasi yang efektif dan efisien.

Berdasarkan uraian tersebut untuk itu penerapan model komunikasi pembangunan dalam upaya pemberdayaan masyarakat nelayan Suku Duano di Propinsi Riau mesti dilakukan dengan merujuk beberapa kajian dan model komunikasi yang dapat dijadikan dasar pelaksanaan dan keberlangsungan program pembangunan.

Strategi Komunikasi dalam Pembangunan Perikanan

Prinsip komunikasi adalah mengubah perilaku, strategi merupakan cara, metode, rencana atau pola yang dipergunakan dalam upaya menyampaikan pesan agar diikuti dengan perubahan perilakunya.

Untuk mewujudkan hal ini, diperlukan pemrakarsa perencana, pengawas penyelenggaraan dan pembina program. Strategi komunikasi pembangunan dalam pengembangan perikanan ini dibagi ke dalam tahapan perencanaan, penyelenggaraan, dan tahap

pembinaan. Dalam tahap perencanaan, diperlukan pemrakarsa baik dari dalam maupun dari luar masyarakat nelayan, pada umumnya berasal dari luar.

Strategi komunikasi diawali dengan perencanaan awal dan dilanjutkan dengan perencanaan akhir. Dalam perencanaan awal, tujuannya untuk menetapkan lokasi program dimana untuk mencapainya diperlukan upaya menggerakkan bentuk-bentuk dasar organisasi nelayan beserta partisipasinya untuk membuat studi kelayakan tentang lokasi, potensi-potensi sumberdaya, kekuatan pendukung dan penghambatnya, serta pola sikap dan perilaku nelayan. Keberhasilan perencanaan dalam meyakinkan ide dasar terutama dalam meyakinkan bahwa masyarakat secara terpadu dan bersama-sama dapat mengubah perilaku yang selama ini dinilai oleh orang luar ketinggalan sehingga mereka berada dalam kelompok yang kurang beruntung. Faktor penting dalam tahap ini adalah tingkat pemahaman dan penerimaan warga masyarakat akan potensi yang dimiliki, serta keterlibatannya dalam perencanaan akan memantapkan penetapan lokasinya.

Pembangunan Perikanan Terpadu

Pembangunan perikanan seiring dengan peningkatan kontribusi sub sektor perikanan dilaksanakan melalui peningkatan produksi perikanan yang berorientasi pada peningkatan nilai tambah (*processing*), peningkatan pendapatan, peningkatan produktivitas tenaga kerja dan peningkatan perluasan kesempatan kerja. Bertitik tolak dari pemikiran tersebut, maka tujuan pembangunan perikanan Pelita V (Dirjen

Perikanan, 1989) adalah: (1) Meningkatkan produksi dan mutu hasil perikanan untuk memenuhi kebutuhan pangan dan gizi, bahan baku industri serta meningkatkan ekspor hasil perikanan. (2) Meningkatkan produktivitas usaha perikanan dan nilai tambah serta meningkatkan pendapatan nelayan dan petani ikan. (3) Memperluas lapangan kerja dan kesempatan berusaha serta menunjang pembangunan daerah. (4) Meningkatkan pembinaan kelestarian sumber daya perikanan dan lingkungan hidup.

Membangun bermakna mengubah perilaku masyarakat secara berencana, membangun sub sektor perikanan bukan semata peningkatan produksinya melalui perubahan-perubahan struktur masyarakatnya saja, tetapi mencakup perubahan pola nilai serta peranannya. Ada tiga aspek yang dapat diperhatikan dalam proses pembangunan (Ben-Yami, 1986) yaitu: (1) Peningkatan mutu dan tingkat kehidupan, (2) Kemajuan sosial dalam arti persamaan dan hak perorangan, (3) Perbaikan teknoekonomi dalam arti peningkatan kondisi dan nilai produksi serta suplai. Aspek-aspek tersebut yang perlu diperhatikan dalam perencanaan program pembangunan, termasuk merencanakan program pembangunan sub sektor perikanan ini.

Membangun sub sektor perikanan berarti membangun orang-orang yang bergerak dalam bidang perikanan, membangun orang-orang yang memproduksi menangkap ikan, membangun cara menangkap, menangani, mengolah, memasarkan ikan. Membangun tempat tinggal,

berlayar, berlabuh, pendaratan ikan, tnelelang, membeli alat dan bahan berlayar, sarana dan prasarana dimana masyarakat penangkap ikan itu berada. Membangun jaringan sosial, ekonomi, jasa, informasi, termasuk organisasi dsb dimana masyarakat nelayan itu akan memanfaatkannya. Jika hal itu dapat direncanakan dan diimplementasikan secara terpadu, terintegrasi, melibatkan peran mereka, di tempat mereka, dalam keterjangkauan mereka, maka akan terciptalah masyarakat perikanan yang diinginkan.

Tujuan jangka panjang program pembangunan perikanan skala kecil yang terpadu ini adalah pembinaan bertahap terhadap masyarakat nelayan yang terorganisir secara baik dan mandiri. Nelayan akan mendapatkan segala kemudahan yang diperlukan untuk: operasi (berlayar), mendapat pelayanan kredit, nasehat dan bantuan teknis. Akan mudah mendapatkan pelayanan sosial seperti kesehatan, pendidikan, listrik; warung, rekreasi dsb. Dengan terciptanya pusat masyarakat perikanan baik dalam pertumbuhan kelembagaan vertikal maupun horisontal akan terciptalah iklim pedesaan yang mampu menyedot angkatan kerja dan sekaligus perikanan yang mempunyai tanggung jawab terhadap ketenagakerjaan dapat dijawab.

Penduduk Kawasan Panglima Raja nelayan Suku Duano dengan segala keterbatasan kemampuan, keterampilan, dan kuatnya tekanan pedagang atau juragan, masih mampu mempertahankan hidup diri dan keluarga. Ketangguhan untuk bertahan hidup dalam keterbatasannya itu merupakan

kekuatan dahsyat jika dihimpun dalam jaringan, kelompok atau kelembagaan yang ada dalam jangkauannya (waktu, tempat, kemampuan dan kelasnya), baik untuk produksi, pengolahan, maupun dalam pemasarannya.

Bagaimana kemampuan pihak luar merancang dan menggerakkan potensi tersebut sehingga mereka mampu bergabung dalam satu kelompok yang mempunyai kekuatan untuk menentukan nasib mereka sendiri di tengah keterpaduan vertikal dan horisontal tersebut. Ada tiga pilihan dasar untuk mengangkat nelayan, yaitu (1) Membiarkan mereka membangun sendiri, (2) mendukung usaha perseorangan yang ditentukan untuk dan dipilih oleh peserta atau kelompok sasaran, sehingga dapat menerobos kemandekkan situasi dan diikuti oleh percepatan pembangunan di bidang yang lebih khas dengan harapan, dan (3) Pembangunan masyarakat nelayan dengan pelayanan, fasilitas, organisasi dan kelembagaan yang diperlukan untuk keadaan masyarakat yang mandiri.

Dalam konsep Chambers (1982) bahwa terhadap masyarakat desa sebagai kelompok yang tidak beruntung, berada dalam kemiskinan terpadu dalam "deprivasi" ketidakberdayaan, terisolasi, kerawanan, kemiskinan, dan kelemahan fisik, ia mengajukan konsep mendahulukan yang terakhir dengan arus balik yaitu upaya memperlambat, menghentikan, bahkan membalikkan proses yang menjerumuskan mereka dalam kesengsaraan, hal ini diperlukan orang-orang profesional jiwa pelopor dan mempunyai aliran multi disiplin. Ben-Yami (1986) dengan konsepnya pembangunan perikanan dengan

menggerakkan bentuk-bentuk dasar organisasi nelayan dan partisipasinya pada desa pantai untuk menghentikan deprivasi kemiskinan terpadu seperti yang digambarkan oleh Chambers.

Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan

Setiap bentuk perencanaan pasti mempunyai implikasi atau menyangkut aspek sosial, karenanya dapat dianggap bahwa perencanaan merupakan bentuk keputusan yang memberikan arahan dan pedoman bagi perilaku manusia. Conyers (1984) mengemukakan tiga alasan mengapa partisipasi masyarakat diperlukan dalam perencanaan pembangunan, yaitu:

1. Partisipasi masyarakat merupakan alat untuk mengetahui informasi mengenai kondisi, kebutuhan sikap masyarakat setempat.
2. Masyarakat akan lebih mempercayai proyek atau program pembangunan jika dilibatkan dalam proses persiapan dan perencanaan, karena mereka akan lebih memahami dan merasa memiliki proyek tersebut.
3. Partisipasi adalah hak demokrasi untuk berunding rembuk dalam menentukan jenis pembangunan yang akan dilaksanakan di daerah mereka.

Metode mendapatkan partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan, dikemukakan oleh Conyers (1984) menyatakan bahwa pembangunan masyarakat (*community development*) akan memungkinkan adanya

keuntungan yang tidak diperoleh dengan metode yang lain.

Beberapa nilai lebih selain dapat memperoleh partisipasi masyarakat, dengan pendekatan pembangunan masyarakat dalam merencanakan program pembangunan perikanan adalah:

1. Melibatkan sumber-sumber dan tenaga setempat serta kemampuan organisasi dan manajerial lokal, maka akan membentuk kemandirian.
2. Upaya pembentukan organisasi lokal, lembaga-lembaga serta panitia dalam berbagai fungsi sosial akan mendorong terciptanya kekompakan.
3. Mempertebal keyakinan mereka mengenal situasi dan arah perubahan sosial serta masalah-masalah penyelenggaraan program, sebagaimana besar bergantung pada pola pemilikan komponennya, baik yang dimiliki perorangan, koperasi, perusahaan, masyarakat atau pemerintah. Walaupun demikian, siapapun pemiliknya program pembangunan perikanan adalah kumpulan fasilitas dan pelayanan untuk nelayan yang harus secara adil dan merata terjangkau oleh setiap nelayan. Dalam pelaksanaan sebuah kontrak, diperlukan kepercayaan dan pengawasan.

Pelaksanaan program MCRMP hingga dari tahun 2003 hingga tahun 2008 di Propinsi Riau utamanya pelaksanaan dalam pemberdayaan masyarakat nelayan perlu memperhatikan pesan-pesan komunikasi pembangunan, upaya mencapai hasil dari pesan

komunikasi pembangunan perlu menganalisis terhadap tujuan dan luaran yang ingin dihasilkan dari sebuah program.

Untuk itu sumber pesan pembangunan dalam pelaksanaan program MCRMP perlu diperhatikan sebagai bagian yang penting dalam menyamakan persepsi dan merubah perilaku masyarakat sebagai sasaran pembangunan, kemudian isi pesan harus betul-betul diperhatikan dan dipahami agar proses pelaksanaan dapat berjalan sesuai tujuan.

Saluran apa yang digunakan dalam penyampaian pesan dari program MCRMP merupakan hal yang berkaitan bagaimana masyarakat mau memberikan respon baik, karena respon merupakan bagian terpenting keberhasilan program agar masyarakat mampu berpartisipasi dalam program pembangunan.

Kesimpulan

Capaian program pembangunan perikanan *Marine and Coastal Resources Management Project* dalam memberdayakan masyarakat Suku Duano di Propinsi masih meninggalkan berbagai permasalahan, untuk itu diperlukan analisis model komunikasi dalam program pembangunan perikanan yang diimplementasikan untuk kesejahteraan nelayan. Membangun pedesaan khususnya masyarakat nelayan diperlukan pendekatan partisipatif dan prinsip keterpaduan. Pendekatan partisipatif ini melalui upaya menggerakkan bentuk-bentuk organisasi kelompok paling dasar bersamaan dengan peransertanya untuk membangun diri dan lingkungannya. Prinsip keterpaduan bermakna vertikal dan horizontal.

Dengan menggerakkan bentuk organisasi kelompok paling

dasar dalam masyarakat nelayan bersamaan dengan partisipasinya sehingga membentuk suatu ikatan jalinan fungsi dan peran yang interaktif, sehingga terciptanya keadaan masyarakat perikanan yang sejahtera sesuai dengan tujuan pembangunan.

DAFTAR PUSTAKA

- BP3SP, Faperika UR. 2008. Laporan Kegiatan Small Scale Natural Resources Management. Kerjasama Bappeda inhil.
- Ben-Yami. 1986. *Comunity Fisheries Centre: Guideline for Establishment and Operation*. FA0 Fish Tech.
- Chambers, D. 1984. *Pembangunan Desa Mulai dari Belakang*. Terjemahan LP3ES. Jakarta.
- Conyers. 1989. *Laporan Pengkajian Pelaksanaan Penyuluhan Perikanan BagiNelnyan*. Bogor: Ciawi.
- De Vito, J.A. 1993. *The Interpersonal Communication Book*. Harper and Row, New York.
- Departemen Dalam Negeri. 1992. Undang-Undang Republik Indonesia No.12 Tahun 1992 Tentang Sistem Budidaya Pertanian.
- Kifli, Gontom C. 2007. Strategi Komunikasi Pemberdayaan Komunitas Dayak di Kalimantan Barat. Forum Penelitian Agro Ekonomi. Volume 25 No. 2, Desember 2007 : 117 – 125. Jurnal
- Mahmud, Amir 2007. Model Komunikasi dalam Penyediaan Sarana Air Bersih di Pedesaan di Kawasan Pesisir Jawa Tengah. Tesis Pascasarjana Magister Sains Pembangunan Universitas Diponegoro. Semarang
- Noor, Marzuki. 2008. Strategi Komunikasi Pembangunan Masyarakat Pusat Perikanan. Jurnal Aplikasi Manajemen, Volume 6. Nomor 1 . Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia. April 2008. Jurnal
- Pidato Presiden RI, 2005. Pencanaan Revitalisasi Pertanian, Perikanan dan Kehutanan, Jatiluhur Purwakarta tanggal 11 Juni 2005.
- Pranadji, T. 2005. Kemajuan Ekonomi, Reformasi Agraria dan Land Reform di Pedesaan. Analisis Kebijakan Pertanian Volume 3 no.2 Juni 2005. Pusat Analisis Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian, Bogor.159-178
- Rangkuti, Parlaungan Adil. 2009. Strategi Komunikasi Membangun Kemandirian Pangan. Jurnal Litbang Pertanian, 28 (2)
- Rogers, E.M. 1976. *Communication and Development,Critical Perspective*. Sage, London.
- Rogers, Everett M dan Shoemaker, F Floyd, 1981. Memasyarakatkan Ide-Ide Baru, Usaha Nasional. Surabaya.

Rogers, E. M. 1983. *Diffusion of Innovation* (3rd edition). The Free Press, New York. USA

Zulkarnain. 2009. Strategi Pengelolaan Sumberdaya Pesisir Berbasis Masyarakat, Kasus Kawasan Panglima Raja Indragiri Hilir Riau. Berkala Perikanan Terubuk Vol 37 No 2 Juli 2009. ISSN 0126-4265 Jurnal terakreditasi No. 23a/DIKTI/Kep/2004.